

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI
KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR BADAN
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN ASET DAERAH (BPPKAD)
DI KOTA SURAKARTA**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh :

WITA LIANTINO

B 100 140 100

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ASET DAERAH (BPPKAD)
DI KOTA SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

WITA LIANTINO

B100140100

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Surakarta, 6 April 2018

Dosen Pembimbing



Zulfa Irawati, S.E., M.Si

NIDN: 0617027102

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) DI KOTA SURAKARTA**

Oleh:

WITA LIANTINO

B100140100

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhamadiyah Surakarta

Pada hari Jumat, 6 April 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Drs. Moechammad Nasir, M.M**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Rini Kuswati, S.E., M.Si**
(Sekretaris Dewan Penguji)
3. **Zulfa Irawati, S.E., M.Si**
(Anggota Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhamadiyah Surakarta



(Dr. H. Syamsudin, SE., M.M)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 April 2018



WITA LIANTINO

B100140100

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) DI KOTA SURAKARTA

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan BPPKAD Kota Surakarta tahun 2012-2016 dilihat dari 5 rasio keuangan daerah: 1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 2) Rasio Efektifitas PAD, 3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, 4) Rasio Aktifitas, 5) Rasio Pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Aktifitas, Rasio Pertumbuhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPPKAD Kota Surakarta dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dianggap tinggi yang termasuk dalam pola delegatif (2) Rasio Efektifitas PAD efektifitas kinerja keuangan Kota Surakarta termasuk dalam kategori belum efektif sehingga harus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dinyatakan tidak efisien sehingga pemerintah Kota Surakarta harus mengurangi besarnya belanja yang dikeluarkan. (4) Rasio Aktifitas/rasio keserasian dianggap cukup baik, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam melakukan kegiatan kebutuhan pembangunan daerah tersebut. (5) Rasio Pertumbuhan secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan sehingga membuat kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Kota Surakarta. Sebaiknya Pemerintah Kota Surakarta memperbaiki 4 rasio yaitu rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas, dan rasio pertumbuhan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan Daerah

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of BPPKAD Kota Surakarta in 2012-2016 seen from 5 local financial ratios: 1) Ratio of Regional Financial Independence, 2) PAD Effectiveness Ratio, 3) Regional Financial Efficiency Ratio, 4) Activity Ratio, 5) Ratio Growth This research uses descriptive methods that are quantitative. This research was conducted at the office of Financial and Asset Management Agency of Surakarta City. Data collection by documentation method. The analytical technique used is descriptive quantitative by using the formula: Ratio of Regional Financial Independence, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Activity Ratio, Growth Ratio. The results of the analysis show that the Financial Performance of BPPKAD Kota Surakarta is seen from (1) The ratio of Regional Financial Independence is considered high which is included in the delegative pattern (2) Effectiveness Ratio of PAD

effectiveness of the financial performance of Surakarta City included in the category not yet effective so that it should optimize the management of resources and expand the sector - sectors with the potential to increase the Local Original Revenue (3) The Regional Financial Efficiency Ratio is declared inefficient so the Surakarta City government must reduce the amount of expenditure spent. (4) Ratio Activity / harmony ratio so that the cost incurred by Surakarta Municipal Government in expenditure of capital enough capable in doing activity of development requirement of that area. (5) The Growth Ratio as a whole has decreased significantly, making it less than the maximum amount of income received by Surakarta City. Surakarta City Government should improve the 4 ratios of effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio, and growth ratio

Keywords: Regional Financial Performance, Regional Financial Ratios

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemerintah daerah merupakan lembaga yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan dan mengatur sendiri kepentingan bangsa dan negara di daerah. Lembaga Pemerintah Daerah mempunyai tujuan untuk melakukan pembangunan-pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum dengan mengadakan program Otonomi Daerah. Hal ini bertujuan memajukan setiap daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri seluruh pemerintahan dan pembangunan di daerah yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, adanya Otonomi Daerah Pemerintah Daerah tidak mempunyai batasan untuk memajukan, memfasilitasi, dan membangun setiap daerah. ada dua asas dalam melaksanakan Otonomi Daerah yaitu asas desentralisasi dan dekonsentralisasi.

Dengan adanya program Otonomi Daerah tentunya Pemerintah Daerah memerlukan sistem keuangan yang baik untuk mengolah APBD yang bersifat efisien dan akuntabel. Dengan mengadakan Manajemen keuangan daerah, manajemen keuangan daerah merupakan salah satu kunci dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan analisis terhadap kinerja keuangan di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta menjadi sumber informasi yang penting untuk membuat segala kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan latar belakang diatas, maka peneliti mencoba untuk mengetahui rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja keuangan dalam lembaga pemerintahan daerah dan tertarik untuk mengangkat judul “ Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kota Surakarta”.

2. METODE

2.1 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang sudah ada pada Kantor BPPKAD Kota Surakarta, dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi ini mengumpulkan data-data dari Kantor BPPKAD Kota Surakarta yang berupa data khusus dan data umum. Data umum yang berupa:

1. Gambaran umum Kota Surakarta
2. Gambaran umum kantor BPPKAD Kota Surakarta
3. Dan data khusus yang berupa Laporan Anggaran Pemerintah Kota Surakarta tahun 2012-2016.

3.2 Desain Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, seperti yang telah dikemukakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap yang paling tahu tentang sesuatu yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjejelajahi objek/situasi social yang diteliti (Sugiyono, 2015:144).

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang

berasal dari sumber yang lain. Rasio Kemandirian Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah pusat atau Provinsi dan pinjaman}} \dots\dots\dots(1)$$

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim, (2007)

- a. Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.3.2 Rasio Efektivitas

Rasio Efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yg Ditetapkan Berdasar Potensi Riil Daerah}} \dots\dots\dots(2)$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahsun (2009), adalah:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektifitas berimbang
- c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

2.3.3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \dots\dots\dots(3)$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Presentasi Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2007)

2.3.4. Rasio Aktivitas

2.3.4.1 Rasio Kesenjangan

Rasio Kesenjangan adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \dots\dots\dots(4)$$

Belum ada tolak ukur yang pasti untuk menentukan berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan

besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Abdul Halim,2007:235).

2.3.4.2 *Debt Service Coverage Ratio*

Untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain melalui pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah:

- 1) Ketentuan yang menyangkut persyaratan
 - a) Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75 persen dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.
 - b) *Debt service coverage ratio (DSCR)* minimal 2,5

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan, Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan jumlah angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

$$DSCR = \frac{(PAD+BD+DAU)-BW}{\text{Total(Pokok Angsuran+Bunga+Biaya Pinjaman)}} \dots\dots\dots(5)$$

2.3.5 Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketuinya pertumbuhan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Pertumbuhan\ PAD = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ X_n - X_{n-1}}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD\ X_{n-1}} \times 100\% \dots (6)$$

3 HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

3.1 Rasio Kemandirian

Tabel 3. Hasil Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (dalam Rupiah)	Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman (dalam Rupiah)	RASIO KEMANDIRIAN (dalam %)
2012	1.164.569.524.180,00	1.580.982.708.236,00	73,25
2013	1.765.586.796.874,00	2.447.371.262.349,00	72,14
2014	1.882.430.976.125,36	1.980.583.620.138,00	95,04
2015	2.177.987.477.485,32	2.270.041.892.842,28	95,95
2016	2.479.476.394.995,00	2.687.437.213.581,12	92,26

Sumber: Laporan keuangan Kota Surakarta 2012-2016

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2012-2016 dan dengan perhitungan rasio kemandirian yang diukur dengan akun Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan pada Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan pinjaman dengan akun sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, akun penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, akun penerimaan kembali dari pinjaman / dana bergulir, dan penerimaan dari dana pihak ketiga maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

Rasio Kemandirian

$$Tahun\ 2012 = \frac{Rp.\ 1.164.569.524.180,00}{Rp.\ 1.580.982.708.236,00} \times 100\% = 73,25\%$$

Rasio Kemandirian

$$Tahun\ 2013 = \frac{Rp.\ 1.765.586.796.874,00}{Rp.\ 2.447.371.262.349,00} \times 100\% = 72,14\%$$

Rasio Kemandirian

$$Tahun\ 2014 = \frac{Rp.\ 1.882.430.976.125,36}{Rp.\ 1.980.583.620.138,00} \times 100\% = 95,04\%$$

Rasio Kemandirian

$$Tahun\ 2015 = \frac{Rp.\ 2.177.987.477.485,32}{Rp.\ 2.270.041.892.842,28} \times 100\% = 95,94\%$$

Rasio Kemandirian

$$Tahun\ 2016 = \frac{Rp.\ 2.479.476.394.995,00}{Rp.\ 2.687.437.213.581,12} \times 100\% = 92,26\%$$

Hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dengan melihat rasio kemandirian yang dihasilkan Kota Surakarta tahun 2012-2016 memiliki nilai tahun 2012 sebesar 73,25%; tahun 2013 sebesar 72,14%; tahun 2014 sebesar 95,04%; tahun 2015 sebesar 95,94%, dan tahun 2016 sebesar 92,261%. Berdasarkan Tabel 3 rata-rata rasio kemandirian sebesar 85,53% dari tahun 2012-2016 sesuai dengan tingkat kemampuan daerah secara rata-rata dianggap tinggi yang terletak antara 75% - 100% berarti pola hubungan yang terjadi adalah pola delegatif.

3.2 Rasio Efektivitas

Tabel 4. Hasil Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Surakarta

TAHUN	REALISASI PENERIMAAN PAD (dalam Rupiah)	TARGET PENERIMAAN PAD (ANGGARAN) (dalam Rupiah)	RASIO EFEKTIVITAS (dalam %)
2012	1.164.569.524.180,00	2.292.673.332.015,00	50,80%
2013	1.765.586.796.874,00	3.189.397.784.000,00	55,36%
2014	1.882.430.976.125,36	3.673.258.540.000,00	51,25%
2015	2.177.987.477.485,32	3.673.258.540.000,00	59,29%
2016	2.479.476.394.995,00	4.557.440.080.000,00	54,41%

Sumber: Laporan keuangan Kota Surakarta 2012-2016

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2012-2016 dan dengan perhitungan rasio efektivitas yang diukur dengan akun realisasi penerimaan asli daerah (PAD) dan akun anggaran penerimaan asli daerah (PAD) maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

Rasio Efektivitas

$$Tahun\ 2012 = \frac{Rp.\ 1.164.569.524.180,00}{Rp.\ 2.292.673.332.015,00} \times 100\% = 50,80\%$$

Rasio Efektivitas

$$Tahun\ 2013 = \frac{Rp.\ 1.765.586.796.874,00}{Rp.\ 3.189.397.784.000,00} \times 100\% = 55,36\%$$

Rasio Efektivitas

$$Tahun\ 2014 = \frac{Rp.\ 1.882.430.976.125.36}{Rp.\ 3.673.258.540.000.00} \times 100\% = 51,25\%$$

Rasio Efektivitas

$$Tahun\ 2015 = \frac{Rp.\ 2.177.987.477.485.32}{Rp.\ 3.673.258.540.000.00} \times 100\% = 59,29\%$$

Rasio Efektivitas

$$Tahun\ 2016 = \frac{Rp.\ 2.479.476.394.995.00}{Rp.\ 4.557.440.080.000.00} \times 100\% = 54,41\%$$

Hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dengan melihat rasio efektivitas yang dihasilkan Kota Surakarta tahun 2012-2016 memiliki nilai tahun 2012 sebesar 50,80%; tahun 2013 sebesar 55,36%; tahun 2014 sebesar 51,25%; tahun 2015 sebesar 59,29%, dan tahun 2016 sebesar 54,41%. Berdasarkan Tabel 4 rata-rata rasio efektifitas sebesar 54,22% dari tahun 2012-2016 sesuai dengan kriteria rasio ini terletak pada kurang dari 100% (<100%) yang berarti dari realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sesuai atau kurang dari target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.3 Rasio Efisiensi

Tabel 5. Hasil Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Surakarta

TAHUN	BIAYA PEMUNGUTAN PAD (BELANJA DAERAH) (dalam Rupiah)	REALISASI PENERIMAAN PAD (PENDAPATAN DAERAH) (dalam Rupiah)	RASIO EFISIENSI (dalam %)
2012	5.478.428.195.396,00	1.164.569.524.180,00	470,43%
2013	6.330.006.971.174,00	1.765.586.796.874,00	358,52%
2014	6.975.826.583.829,85	1.882.430.976.125,36	370,58%
2015	7.637.813.586.421,00	2.177.987.477.485,32	350,68%
2016	8.323.958.340.522,00	2.479.476.394.995,00	335,71%

Sumber: Laporan keuangan Kota Surakarta 2012-2016

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2012-2016 dan dengan perhitungan rasio efisiensi yang diukur pada biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan akun belanja yang direalisasikan dan akun realisasi penerimaan PAD maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

Rasio Efisiensi

$$Tahun\ 2012 = \frac{Rp.\ 5.478.428.195.396,00}{Rp.\ 1.164.569.524.180,00} \times 100\% = 470,43\%$$

Rasio Efisiensi

$$Tahun\ 2013 = \frac{Rp.\ 6.330.006.971.174,00}{Rp.\ 1.765.586.796.874,00} \times 100\% = 358,52\%$$

Rasio Efisiensi

$$Tahun\ 2014 = \frac{Rp.\ 6.975.826.583.829,85}{Rp.\ 1.882.430.976.125,36} \times 100\% = 370,58\%$$

Rasio Efisiensi

$$Tahun\ 2015 = \frac{Rp.\ 7.637.813.586.421,00}{Rp.\ 2.177.987.477.485,32} \times 100\% = 350,68\%$$

Rasio Efisiensi

$$Tahun\ 2016 = \frac{Rp.\ 8.323.958.340.522,00}{Rp.\ 2.479.476.394.995,00} \times 100\% = 335,71\%$$

Hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dengan melihat rasio efektivitas yang dihasilkan Kota Surakarta tahun 2012-2016 memiliki nilai tahun 2012 sebesar 470,43%; tahun 2013 sebesar 358,52%; tahun 2014 sebesar 370,58%; tahun 2015 sebesar 350,68%, dan tahun 2016 sebesar 333,71%. Berdasarkan Tabel 5 rata-rata rasio efektivitas sebesar 377,184% dari tahun 2012-2016, pada rasio efisiensi terletak pada lebih dari 100% maka dinyatakan tidak efisien.

3.4 Rasio Aktivitas/ Keserasian

Tabel 6. Hasil Rasio Belanja Pemerintah Kota Surakarta

TAHUN	BELANJA RUTIN (dalam Rupiah)	TOTAL APBD (dalam Rupiah)	RASIO BELANJA RUTIN (dalam %)
2012	5.478.428.195.396,00	14.713.563.534.240,00	37,23%
2013	6.330.006.971.174,00	17.060.481.430.700,00	37,10%
2014	6.562.960.182.013,31	18.963.871.865.055,00	34,61%
2015	7.637.813.586.421,00	19.936.887.811.810,00	38,31%
2016	8.323.958.340.522,00	22.653.711.533.416,00	36,74%

Sumber: Laporan keuangan Kota Surakarta 2012-2016

Dari Laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2012-2016 dan dengan perhitungan rasio keserasian yang diukur pada total belanja rutin dengan akun belanja yang direalisasikan dan total APBD dengan anggaran PAD maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

Rasio Keserasian

$$Tahun\ 2012 = \frac{Rp.\ 5.478.428.195.396,00}{Rp.\ 14.713.563.534.240,00} \times 100\% = 37,23\%$$

Rasio Keserasian

$$Tahun\ 2013 = \frac{Rp.\ 6.330.006.971.174,00}{Rp.\ 17.060.481.430.700,00} \times 100\% = 37,10\%$$

Rasio Keserasian

$$Tahun\ 2014 = \frac{Rp.\ 6.562.960.182.013,31}{Rp.\ 18.963.871.865.055,00} \times 100\% = 34,61\%$$

Rasio Keserasian

$$Tahun\ 2015 = \frac{Rp. 7.637.813.586.421,00}{Rp. 19.936.887.811.810,00} \times 100\% = 38,31\%$$

Rasio Keserasian

$$Tahun\ 2016 = \frac{Rp. 8.323.958.340.522,00}{Rp. 22.653.711.533.416,00} \times 100\% = 36,74\%$$

Hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 6 menunjukkan bahwa dengan melihat rasio keserasian (belanja) yang dihasilkan Kota Surakarta tahun 2012-2016 memiliki nilai tahun 2012 sebesar 37,23%; tahun 2013 sebesar 37,10%; tahun 2014 sebesar 34,61%; tahun 2015 sebesar 38,31%, dan tahun 2016 sebesar 36,74%. Berdasarkan Tabel 6 rata-rata rasio belanja (rasio keserasian) sebesar 36, 79% dari tahun 2012-2016. Untuk belanja modal yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surakarta terlihat mengalami peningkatan antara tahun 2012 – 2016. Secara keseluruhan walaupun terjadi fluktuatif akan tetapi belanja modal atau rutin yang dikeluarkan pemerintah tahun 2012-2016 dapat dikatakan cukup baik karena proporsi yang dicapai nya lebih dari 20%.

3.5. Rasio Pertumbuhan

Tabel 7. Hasil Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Surakarta

TAHUN	REALISASI PENERIMAAN PAD t (dalam Rupiah)	REALISASI PENERIMAAN PAD t-1 (dalam Rupiah)	RASIO PERTUMBUHAN (dalam%)
2012	1.164.569.524.180,00	1.029.523.688.529,00	13,11%
2013	1.765.586.796.874,00	1.164.569.524.180,00	51,60%
2014	1.882.430.976.125,36	1.765.586.796.874,00	6,62%
2015	2.177.987.477.485,32	1.882.430.976.125,36	15,70%
2016	2.479.476.394.995,00	2.177.987.477.485,32	13,84%

Sumber: Laporan keuangan Kota Surakarta 2012-2016

Dari Laporan keuangan Pemernitah Kota Surakarta tahun 2012-2016 dan dengan perhitungan rasio pertumbuhan yang diukur dengan akun reliasasi

penerimaan PAD tahun sekarang dan tahun sebelumnya maka dapat dihasilkan analisisnya sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan

Tahun 2012

$$= \frac{\text{Rp. 1.164.569.524.180,00} - \text{Rp. 1.029.523.688.529,00}}{\text{Rp. 1.029.523.688.529,00}} \times 100\% = 13,11$$

Rasio Pertumbuhan

Tahun 2013

$$= \frac{\text{Rp. 1.765.586.796.874,00} - \text{Rp. 1.164.569.524.180,00}}{\text{Rp. 1.164.569.524.180,00}} \times 100\% = 51,60\%$$

Rasio Pertumbuhan

Tahun 2014

$$= \frac{\text{Rp. 1.882.430.976.125,36} - \text{Rp. 1.765.586.796.874,00}}{\text{Rp. 1.765.586.796.874,00}} \times 100\% = 6,62\%$$

Rasio Pertumbuhan

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp. 2.177.987.477.485,32} - \text{Rp. 1.882.430.976.125,36}}{\text{Rp. 2.177.987.477.485,32}} \times 100\% \\ &= 15,70\% \end{aligned}$$

Rasio Pertumbuhan

Tahun 2016

$$= \frac{\text{Rp. 2.479.476.394.995,00} - \text{Rp. 2.177.987.477.485,32}}{\text{Rp. 2.177.987.477.485,32}} \times 100\% = 13,84\%$$

Hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 7 menunjukkan bahwa dengan melihat rasio pertumbuhan yang dihasilkan Kota Surakarta tahun 2012-2016 memiliki nilai tahun 2012 sebesar 13,12% tahun 2013 sebesar 51,61%; tahun 2014 sebesar 6,61%; tahun 2015 sebesar 15,70%, dan tahun 2016 sebesar 13,84%. Pada tahun 2013 rasio pertumbuhannya dapat dikatakan cukup tinggi mencapai 51,61% akan tetapi antara 2014-2016 mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan mencapai tahun 2014 sebesar 6,61%; tahun 2015 sebesar 15,70%; dan tahun 2016 sebesar 13,84%. Berdasarkan tabel 7 rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 20,17% dari tahun 2012-2016.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kinerja keuangan yang dilihat dari rasio kemandirian dengan rata-rata sebesar 85,53% termasuk dalam pola hubungan yang delegatif artinya campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah Kota Surakarta benar-benar mampu dan mandiri. Kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efektifitas dengan rata-rata 54,22% sesuai dengan kriteria kurang dari 100% (<100%) yang artinya penerimaan PAD belum sesuai dengan target penerimaan PAD. Kinerja keuangan yang dilihat dari rasio efisiensi dengan rata-rata 377,184% yang terletak lebih dari (>100%) artinya dinyatakan tidak efisien. Kinerja keuangan dilihat dari rasio keserasian (belanja) rata-rata sebesar 36,79%. Kinerja keuangan dilihat dari rasio pertumbuhan rata-rata sebesar 20,17 % artinya pertumbuhan Kota Surakarta masih rendah.

4.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan periode tahun 2012 -2016.
2. Penelitian ini hanya dilakukan untuk Pemerintah Kota Surakarta

4.3 Saran

1. Pemerintah Kota Surakarta diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan mampu meningkatkan kemandirian daerah Surakarta.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Surakarta lebih proporsional di dalam mengalokasikan belanjanya dengan mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal. Ini dilakukan untuk memperbaiki keempat rasio kecuali rasio kemandirian.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan ada penambahan periode yang semakin panjang agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Surakarta. Memperluas ruang lingkup Wilayah penelitian agar mampu membandingkan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefianto, Doddy, M. 2012, *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*, Jakarta, Erlangga.
- Adhiantoko, Hony. 2013, *Skripsi*. Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Jakarata. Erlangga.
- Hasan, Mustafa, 2000. *Teknik Sampling*, Jakarta. Erlangga
- Halim, Abdul.dan Syam Kusufi, M, 2012, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, edisi pertama jilid 1, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, edisi pertama jilid 1, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2008, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, edisi ketiga jilid 1, Jakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta, STIM YKPN.
- Rahayu Muji, Endang Kus, 2014. *Skripsi*, Surakarta, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Riyanto, Bambang, 2013. *Dasar-Dasar Pembebelanjaan Perusahaan*, edisi 4, Yogyakarta. BPFE.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi revisi. Yogyakarta,UPP STIM YKPN.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi kedua, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Andi.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, ANDI OFFSET cv.
- Purwaningsih, Dian Ika. 2013. *Skripsi*. Surakarta, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Bandung, ALFABETA, cv
- Suparmoko, M. 2005. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, edisi pertama, Yogyakarta, Andi.
- Rosidin Utang, 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, edisi pertama, Bandung, PUSTAKA SETIA, cv

Whenny Dhia C, 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan*, Vol. 2, *Jurnal Ilmiah*. Halaman 40